

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 sampai 2021 lalu sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. akibatnya beberapa sektor usaha seperti gerai, ritel, pelayanan ekspedisi, upaya mikro, kecil serta menengah (UMKM) serta Pabrik Kecil Menengah (IKM). Perihal ini menyebabkan beberapa besar sukarelawan serta pegawai dipulangkan. Masa pandemi lalu cukup memiliki dampak yang besar pada zona UMKM atau IKM, mulai dari penyusutan omzet, arus kas yang terpenggal, serta angsuran macet, sampai kenaikan PHK pekerja.¹

Sebagai salah satu upaya pelaksanaan kebijakan makroprudensial khususnya dalam mendorong fungsi intermediasi serta peningkatan akses keuangan, BI juga memiliki peran dalam pengembangan UMKM. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama BI terkait UMKM adalah akses keuangan. UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi

¹ Amri, A. (2020). Dampak Covid Terhadap UMKM Di Indonesia. Jurnal Brand, 125

stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Namun demikian, pengembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya dari sisi akses keuangan.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan UMKM untuk menghasilkan laporan keuangan yang menjadi alat utama lembaga keuangan menilai kelayakan kredit. Sebagai respon atas kondisi tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral berupaya untuk memberikan kontribusi yang terbaik melalui kebijakan pengembangan UMKM dalam meningkatkan akses keuangan. Selain itu, pengembangan UMKM BI bertujuan pula untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial SDM serta inovasi dari UMKM. Kebijakan Pengembangan UMKM Bank Indonesia diimplementasikan sebagai bagian dari program strategis Bank Indonesia sebagai berikut:

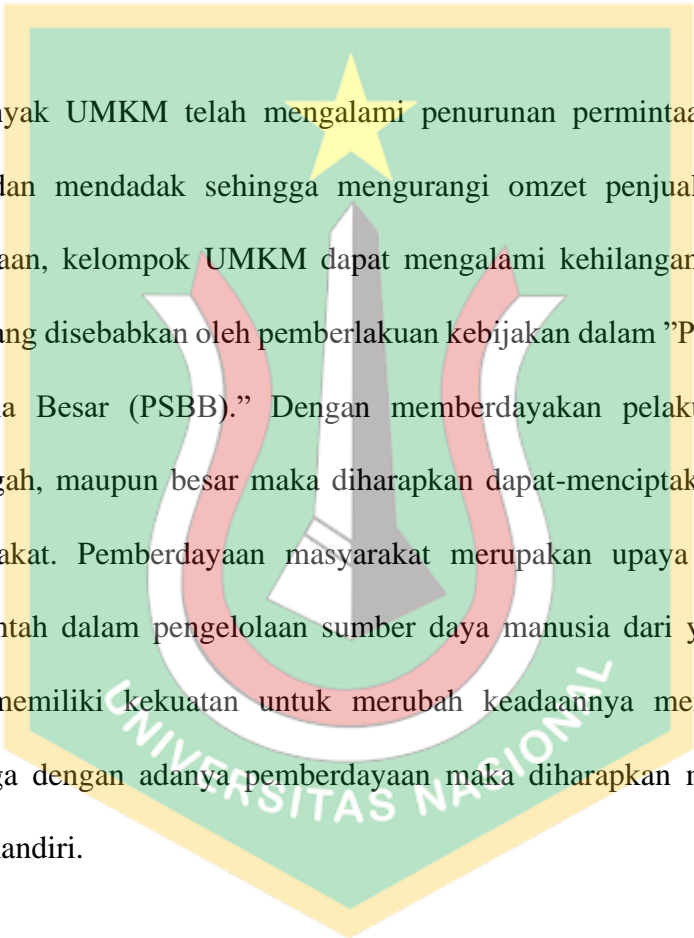
- a. Memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan BI untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah.
- b. Memperkuat sinergi bauran kebijakan BI dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah dalam mengelola defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- c. Memperkuat kebijakan dan surveilans makroprudensial untuk turut memelihara SSK.

- d. Memperkuat kebijakan BI dan sinergi dengan kebijakan pemerintah dan OJK untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan digital.
- e. Mengembangkan kebijakan BI yang bersinergi dengan pihak lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah.
- f. Memperkuat kerjasama internasional untuk memperjuangkan kepentingan BI dan Republik Indonesia.

Penyusunan peta jalan UMKM yang disusun oleh Bank Indonesia meliputi 4 tahapan yakni, UMKM potensial, UMKM success/link to market and finance, UMKM go digital, serta UMKM go export.

Sementara itu, ruang lingkup pengembangan produk UMKM meliputi pengembangan produk volatile food, local economic development serta Wirausaha Bank Indonesia (WUBI). Pada aspek percepatan akses, pengembangan didorong dari akses financial, market, knowledge network, serta inovasi dan digitalisasi. Dukungan dari infrastruktur dan kelembagaan turut memberikan dampak bagi pembentukan ekosistem UMKM yang optimal, diantaranya melalui dukungan regulasi/kebijakan, keuangan inklusif, perlindungan konsumen, edukasi/literasi, model bisnis, monitoring, dan evaluasi serta penguatan kelembagaan dan sistem informasi.

Selain beberapa aspek tersebut, penguatan korporatisasi, penyempurnaan akurasi informasi dan data, optimalisasi koordinasi yang intensif antar kementerian/lembaga, peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi, serta menciptakan ekosistem yang mendukung, merupakan bagian dari faktor pendorong keberhasilan pengembangan UMKM di Indonesia.



Banyak UMKM telah mengalami penurunan permintaan dalam jumlah besar dan mendadak sehingga mengurangi omzet penjualan. Pada waktu bersamaan, kelompok UMKM dapat mengalami kehilangan pasokan tenaga kerja yang disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan dalam "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)." Dengan memberdayakan pelaku industri kecil, menengah, maupun besar maka diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya manusia dari yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan untuk merubah keadaannya menjadi lebih baik sehingga dengan adanya pemberdayaan maka diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri.

Mengingat bahwa yang dibutuhkan Indonesia adalah industri yang padat karya, maka industri kecil cocok untuk dikembangkan. Jangkauan industri kecil sangatlah luas, serta dapat dilaksanakan baik di kota maupun di desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di masing-masing daerah. Industri-Industri kecil di Indonesia tidak lepas dari permasalahan yang harus dihadapi,

diantaranya menurut Tambunan permasalahan dalam pengembangan industri kecil di Indonesia menyangkut aspek finansial seperti modal awal dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi. Industri kecil kebanyakan tidak berminat untuk meminta kredit dari perbankan dan bantuan dari BUMN. Dengan adanya peraturan Bupati Kabupaten Bogor nomor 76 tahun 2020 Tentang pemberian bantuan sosial tunai kepada pelaku usaha mikro atau usaha kecil dalam upaya pemulihan ekonomi di kabupaten Bogor. sesuai dengan Dengan adanya peraturan bupati yaitu : a. bahwa penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor memberikan dampak pada perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor, berupa bantuan tunai bagi pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil dan korban pemutusan hubungan kerja. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai Kepada Pelaku Usaha Mikro atau Pelaku Usaha Kecil dan Korban Pemutusan Hubungan Kerja yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Bogor.

Pemkab sudah bersikeras mengerahkan upaya kecil serta menengah untuk menangani perlambatan gerak ekonomi. Cara distribusi Dorongan Produktif Upaya Mikro (BPUM) ataupun BLT UMKM 2021 kedua langkah dikala itu yang dilakukan pemerintah dalam membantu berjalannya UMKM dalam cara semacam yang dikenal, batasan durasi pengajuan pelakon upaya supaya

memperoleh anggaran baru sebesar Rp1, 2 juta. Pengajuan BLT UMKM tahun 2021 langkah kedua sudah ditutup pada 30 April 2021. Tetapi, pencairannya sedang belum bisa dilaksanakan sebab menunggu cara rekap informasi dari semua Biro Koperasi serta UKM di Indonesia. Departemen Koperasi serta UKM membenarkan akan melarutkan BLT UMKM 2021 langkah kedua saat sebelum Idulfitri, yang hendak jatuh pada 13 Mei 2021. Penguasa hendak lalu gelontorkan dorongan untuk UMKM tahun ini walaupun bahaya serta tantangan penyembuhan ekonomi nasional(Pena) bertambah berat, penguasa senantiasa komitmen membagikan dorongan untuk pelakon upaya spesialnya zona UMKM buat senantiasa bertahan. UMKM ialah salah satu bagian terutama dalam perekonomian serta pembangunan nasional. Mengenang zona UMKM ialah motor pelopor perekonomian serta pembangunan nasional, sehingga dibutuhkan sesuatu strategy kenaikan kapasitas zona UMKM. Hal ini bermaksud untuk mendukung usaha penyelesaian kekurangan serta kesenjangan dan kenaikan peluang kegiatan. Di dasar akibat kesejagatan yang menyerang bumi menuntut situasi perekonomian sesuatu negeri wajib efisien, berdaya guna serta berakal saing.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat pasca pandemi seperti ssat ini tengah fokus mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bangkit. Pemkab Bogor siap membesarkan UMKM di Kabupaten Bogor dengan berbagai upaya, salah satunya dengan kebijakan yang langsung menyentuh kepada UMKM, dengan tujuan terciptanya pergerakan ekonomi dalam rangka

pemulihan ekonomi daerah. Saat ini Pemkab Bogor tengah fokus pada percepatan pemulihan ekonomi sehingga sangat penting untuk mendorong UMKM untuk bangkit, mengingat potensi dan besarnya kontribusi UMKM dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian negara. Sementara itu, berdasarkan survei Katadata Insight Center (KIC) terhadap pelaku UMKM di Jabodetabek, 82,9% UMKM merasakan dampak negatif pandemi sebesar 63,9% UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30% dari biasanya. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet dan bertahan dengan mengoptimalkan platform online.

UMKM memiliki segmentasi konsumen lokal, bahan baku lokal, dan skala usahanya kecil sehingga lebih lincah dan adaptif dalam menghadapi tekanan dan kondisi yang berubah-ubah. Namun kondisi pandemi yang berlangsung cukup lama memang telah berdampak pada UMKM. Untuk diketahui, berdasarkan data BPS tahun 2020 menyebutkan, terdapat 718.337 UMKM di Kabupaten Bogor, dan sebanyak 28.857 UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor melalui Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin), Diskop UKM, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), secara rutin mengadakan kegiatan fasilitasi UMKM.²

² Tim komunikasi publik/diskominfo kabupaten Bogor diakses dari <https://bogorkab.go.id/post/detail/pemkab-bogor-dorong-pergerakan-ekonomi-dengan-mendukung-umkm>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat mengajukan 421.525 pelaku usaha mikro ke pemerintah pusat menjadi penerima program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021. Jumlah pelaku usaha yang diusulkan sampai dengan 10 Agustus 2021 lalu sebanyak 421.525 pelaku usaha mikro. Penerimaan usulan dari para pelaku usaha mikro itu dibagi menjadi dua tahap pada tahun 2021, yakni periode 13 April hingga 28 April sebanyak 208.850 usulan. Kemudian periode 25 Mei hingga 10 Agustus yaitu sebanyak 212.695 usulan. Kemudian Pemerintahan Desa (Pemdes) Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor saat itu telah merealisasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) 12 Tahap yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2021 kepada warga yang berhak menerimanya yakni 157 KPM. Pengajuan untuk tahap 5,6,7 pada bulan Mei 2021, baru cair awal Agustus dan tanggal 12 Agustus 2021 lalu sudah ditransfer ke rekening yang berhak 157 KPM. Dengan adanya langkah ini dapat memberdayakan UMKM yang terdampak Pandemi Virus Covid-19.

Dengan sigapnya pemerintah Indonesia yang berupaya untuk merealisasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional guna membantu permodalan UMKM pada pasca pandemi. Selain itu, pemerintah pun kerap melakukan stimulus melalui beberapa kebijakan, seperti restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, dan masih banyak lagi. Oleh karena itulah penelitian ini dilakukan guna mengetahui seberapa efektif pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di bidang kuliner di kecamatan gunung putri.

Tabel 1. 1 Tabel Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Menengah di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2021

No	UMKM	satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah UMKM Bidang Industri	Usaha	16,397	18,677	19,493	20,468	21,491	18,100
	a. Olahan makanan dan minuman	Usaha	10,357	11,804	12,319	12,935	14,648	80
	b. Handycraft	Usaha	2,298	2,615	2,729	2,865	3,009	30
	c. Konveksi	Usaha	3,053	3,474	3,626	3,807	3,998	50
	d. Logam	Usaha	689	784	819	860	903	8
2	Jumlah UMKM Bidang Jasa	Usaha	1,109	1,262	1,317	1,383	2,452	48
3	Jumlah UMKM Bidang Pendidikan	Usaha	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah UMKM Bidang Pertanian	Usaha	464	528	515	541	568	5
5	Jumlah UMKM Bidang Peternakan	Usaha	908	1,033	1,509	1,584	1,664	-
6	Jumlah UMKM Bidang Perdagangan	Usaha	1,271	1,446	1,446	1,539	1,616	74
7	Jumlah UMKM Bidang Lainnya	Usaha	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			20,149	22,946	23,948			

Sumber: Dinas UMKM, 2021

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor terlihat jumlah UKM di Kabupaten Bogor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terus meningkat

mengakibatkan persaingan antar pelaku usaha semakin kompetitif. Hal tersebut terjadi karena adanya kesadaran masyarakat tentang berwirausaha. Para pelaku UMKM dituntut untuk memiliki strategi yang mampu menangkap peluang dan lebih inovatif dalam menciptakan serta memasarkan produknya. Banyaknya pelaku usaha membuat konsumen semakin kritis dalam memilih sebuah produk. Dengan begitu, sebagai pelaku UMKM harus mampu menawarkan produk baru (barang atau jasa) yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh pesaing. Dengan semakin berkembangnya suatu bidang usaha maka akan banyak usaha sejenis yang bermunculan, hal ini juga terjadi pada industri makanan dan minuman yang mengakibatkan persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Tingginya pertumbuhan industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang menjadi andalan pemerintah dalam mendorong industri sebagai penggerak ekonomi nasional. Semakin tingginya jumlah penduduk maka semakin banyak juga kebutuhan akan pangan yang dipenuhi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang di jelaskan di atas, maka penelitian rumusan masalah ini adalah melihat seberapa berhasil program dari pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di bidang kuliner di kecamatan gunung putri.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti tentu saja tidak lepas dari adanya sebuah tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah pada pasca pandemi

ini efektif dan tepat pada sasaran atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis:

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi dunia pendidikan dan menciptakan hasil penelitian tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

2. Manfaat Praktis:

- 1) Dapat memberikan masukan dan bantuan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dengan Strategi Pemberdayaan sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM melalui di Kecamatan Gunung Putri.
- 2) Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemberdayaan sector UMKM melalui Kecamatan Gunung Putri.
- 3) Dapat menjadi Inspirasi kepada calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang “UMKM” Serta dapat dikembangkan di bidang lainnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan serta membagikan arah dan cerminan modul yang tercantum dalam riset ini, peneliti Menyusun penelitian ini dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, peneliti menguraikan hal-hal yang menyangkut latar belakang kasus, pokok kasus, tujuan, manfaat, serta sistematika penelitian.

BAB II Kerangka Teoritik

Dalam bab ini, peneliti membahas mengenai teori-teori dan konsep yang diambil dari beberapa literatur yang relevan sebagai landasan dari penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini, peneliti hendak menguraikan pendekatan riset, kategori riset, Metode Pengumpulan Informasi, Metode pengecekan keabsahan informasi, serta analisis informasi lewat pengelolaan informasi serta interpretasi ataupun pemaknaan informasi.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini, peneliti menjabarkan analisis data gambaran universal mengenai Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Kecamatan Gunung Putri dan juga hasil mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Kuliner di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

BAB V Penutup

Dalam bab ini membahas mengenai beberapa kesimpulan dari penelitian yang akan dijadikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.